



KR-Efity Widiyono Putro

SADAR PROTOKOL: Seorang ibu memakaikan masker pada putrinya saat mengunjungi Embung Senja di Dusun Sendari, Tirtoadi, Mlati, Sleman, Kamis (25/6) sore. Sebagian pengunjung sadar dan taat terhadap peringatan dari pengelola objek wisata tersebut untuk memperhatikan protokol kesehatan, termasuk memakai masker, agar penularan Covid-19 bisa dicegah untuk menyongsong kenormalan baru.

SAKSI PENYIDIKAN PROYEK E-KTP

Mantan Menkeu Diperiksa KPK

JAKARTA (KR) - Komisi Pembantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Menteri Keuangan (Menkeu) Agus Martowardojo dalam penyidikan kasus korupsi pengadaan paket penerapan elektronik KTP (e-KTP). Usai diperiksa ia mengatakan, dirinya dimintai keterangan penyidik KPK perihal proses penganggaran proyek tersebut.

"Kurang lebih pemeriksaan kali ini sama ini seperti pemeriksaan untuk e-KTP," kata Agus di KPK, Kamis (25/6). Ia mengatakan demikian, karena telah dilakukan pemeriksaan sebelumnya pada 17 Mei 2019.

Diungkapkan Agus, dalam kasus ini ada tersangka Paulus, Isnur Fahmi dan Miriam. "Kemudian saya dimintai keterangan terkait proses anggaran yang dilakukan Kemenag, hubungan Kemenkeu dengan Komisi II DPR dan kita jelaskan, ku-

rang lebih yang ditanyakan sama," tutur Agus.

Agus yang juga mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) itu diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra Paulus Tannos (PST) dan kawan-kawan. "Yang bersangkutan diperiksa terkait kasus e-KTP sebagai saksi untuk tersangka PST dan kawan-kawan," jelas Plt Jubir KPK Ali Fikri.

Agus menyatakan, dalam pemeriksaan ini juga menjelaskan soal *multi-years contract* atau kontrak tahun jamak dalam proyek e-KTP tersebut. Kalau permohonan *multi-years contract* itu harus diajukan kepada Kemenkeu, kalau Kemenkeu mereview dan menyetujui, artinya kalau melaksanakan proyek itu bisa lebih dari 12 bulan.

Pada 17 Mei 2019 Agus telah diperiksa dalam penyidikan kasus

yang sama untuk tersangka Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Markus Nari (MN). Saat itu, penyidik mengonfirmasi Agus soal anggaran pengadaan paket penerapan e-KTP ketika bersangkutan menjabat Menteri Keuangan.

Diketahui, KPK pada 13 Agustus 2019 telah mengumumkan empat tersangka baru dalam pengembangan kasus e-KTP, yakni anggota DPR RI 2014-2019 Miriam S Hariyani (MSH), Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra Paulus Tannos (PST). Kemudian, Dirut Perum Percetakan Negara RI (PNRI) dan Ketua Konsorsium PNRI Isnur Edhi Wijaya (IEW) serta Staf Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan Ketua Tim Teknis Teknologi Informasi Penerapan e-KTP Husni Fahmi (HSF). (Ful)-d

POSITIF COVID-19 NASIONAL 50.187 KASUS

DIY Masuk Wilayah Berisiko Rendah

JAKARTA (KR) - Jumlah kasus baru positif Covid-19 yang dilaporkan Pemerintah bertambah 1.178 orang pada Kamis (25/6), sehingga total di seluruh Indonesia mencapai 50.187 orang.

Menurut Juru Bicara Nasional Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto di Gedung BNPB, Jakarta, jumlah pasien sembuh bertambah 791 orang sehingga menjadi 20.449 orang. Sedangkan angka kematian akibat Covid-19 bertambah 47 kasus menjadi 2.620 orang.

Pemerintah juga melaporkan adanya 37.294 Orang Dalam Pemantauan (ODP) dan 13.323 Pasien Dalam Pengawasan (PDP) yang masih diawasi. "Total 446 kabupaten dan kota telah terdampak," kata Yurianto.

Yurianto menegaskan, adanya masyarakat yang tak menjaga jarak dan tidak mengenakan masker menjadi faktor utama penularan Covid-19 masih terjadi. Karena itu warga diminta tertib melaksanakan protokol

baru kehidupan yang lebih sehat.

Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 kemarin mengumumkan wilayah administrasi di tingkat kabupaten dan kota yang berisiko rendah terhadap penyebaran Covid-19. Sebanyak 188 wilayah dengan risiko rendah telah ditentukan berdasarkan analisis sejumlah indikator. Dalam hal ini, lima wilayah yang ada di DIY yakni Kota Yogyakarta, Kabupaten Kulonprogo, Bantul, Sleman dan Gunungkidul masuk di antara 188 wilayah tersebut.

Untuk Jawa Tengah wilayah yang masuk yakni Kabupaten Banjarnegara, Batang, Kota Surakarta dan Kota Tegal, Kabupaten Karanganyar, Temanggung, Pemalang, Tegal, Kebumen, Sukoharjo, Grobogan, Banyumas, Boyolali, Pati, Brebes, Sragen, Purbalingga, Purworejo, Wonosobo, Cilacap, dan Klaten.

Tim Pakar GTPP Covid-19 Dewi Nur Aisyah mengatakan, pihaknya menggunakan 15 indikator kesehatan

an masyarakat yang terbagi menjadi epidemiologi 11 indikator, surveilans kesehatan masyarakat 2 indikator, pelayanan kesehatan 2 indikator dan persentase kasus sembuh 1 indikator.

"Persentase kasus sembuh untuk menghitung sudah seberapa banyak orang yang sudah terpapar Covid-19, kemudian dapat sembuh di sebuah wilayah," kata Dewi.

Ditambahkan, semakin baik angkanya atau mendekati 100 persen, semakin tinggi penilaian yang akan dihasilkan.

Juru Bicara GTPP Covid-19 Kabupaten Magelang Nanda Cahyadi Pribadi mengatakan, kasus positif Covid-19 yang dinyatakan sembuh kembali bertambah tujuh orang, sehingga total sudah ada 122 yang sembuh dari jumlah kumulatif 143 orang. Kini tinggal 15 yang dirawat dan dua menjalani isolasi mandiri dengan pengawasan ketat dari Gugus Tugas Kabupaten, Satgas Kecamatan serta Desa. (Ati/Bag)-d

UJI COBA PEMBUKAAN TWC BOROBUDUR Banyak Pengunjung Beli Tiket Langsung

MAGELANG (KR) - Hari pertama uji coba pembukaan operasional dengan pembatasan pengunjung di kawasan Taman Wisata Candi (TWC) Borobudur, Kamis (25/6), disambut antusias masyarakat maupun wisatawan dari berbagai daerah. Bahkan sebelum loket masuk dibuka, pengunjung sudah menunggu di areal parkir.

General Manager Taman Wisata Candi (TWC) Borobudur I Gusti Putu Ngurah Sedana menyampaikan, hingga pukul 11.30 tercatat ada sekitar 115 pengunjung yang membeli tiket langsung. Informasi lain yang diperoleh KR, hingga ditutup jam kunjungan di hari pertama pukul 16.00 tercatat ada 251 pengunjung yang membeli tiket langsung di lokasi penjualan *main gate* TWC Borobudur. Sedangkan yang membeli tiket secara online 15 orang.

Pengunjung ada yang berspekulasi datang, ada juga yang memang sudah memperoleh informasi dari internet, serta ada pula yang karena kebetulan melintas di wilayah Borobudur.

Seperti dikatakan Ali Taufik dari Jakarta, yang datang ke Borobudur bersama keluarganya. Mereka berangkat dari Jakarta Rabu (24/6) malam pukul 21.00 dan Kamis pagi pukul 06.30 sudah di tiba di Borobudur. Untuk lebih meyakinkan, Ali Taufik bertanya lagi kepada petugas di TWC Borobudur. Mereka kemudian menunggu hingga pukul 08.15, untuk kemudian masuk ke kawasan TWC Borobudur.

Meski belum sampai naik ke areal bangunan Candi Borobudur di Zona 1, Ali Taufik merasa bahagia bisa menikmati suasana di taman dan sekitar Candi Borobudur, foto-foto maupun lainnya. (Tha)-d

RISET DAN PENGUJIAN BALITBANGTAN Pangan Lokal Berkhasiat Jaga Imun

JAKARTA (KR) - Sejumlah pangan lokal seperti singkong, jagung, sagu, talas ternyata berkhasiat meningkatkan sistem imun tubuh manusia. Dari beberapa hasil riset dan pengujian yang dilakukan Balitbangtan menunjukkan, pangan lokal mempunyai khasiat dan manfaat untuk menjaga imun manusia

Demikian disampaikan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) Kementerian Pertanian (Kementan) Fadry Djufry saat membuka seminar nasional online bertema 'Peran Pangan Fungsional dan Neutrasetikal dalam Meningkatkan Sistem Imun Mencegah Covid-19', di Jakarta, Kamis (25/6). "Beberapa hasil riset dan pengujian yang dilakukan Balitbangtan menunjukkan pangan lokal ini mempunyai khasiat dan manfaat untuk menjaga imun," kata Fadry Djufry.

Hingga saat ini, vaksin Covid-19 belum ditemukan karena memerlukan waktu panjang. Sementara virus penyebab pandemi ini, cepat mereplikasi dan bermutasi. Hasil riset menyebutkan, virus SARS-CoV-2 yang ada di Eropa berbeda dengan yang ada di Asia maupun di Indonesia.

Untuk itu, lanjut Fadry, kedisiplinan dalam menjaga jarak, menjaga kebersihan dan lain-lain sangat penting untuk mencegah penyebaran Korona. "Tak kalah penting adalah menjaga daya tahan tubuh. Pilihan kita adalah memperbaiki nutrisi dengan cara menyiapkan dan memilih pangan yang bermanfaat bagi daya tahan tubuh," katanya.

Oleh karena itu, Balitbangtan mendorong beberapa Unit Pelaksana Teknis (UPT) untuk terus mencoba mencari potensi dari sekian banyak pangan lokal dan obat herbal yang bisa memberikan solusi. (Ati)-d

PEMKAB KULONPROGO SURATI KEMENHUB

Tuntaskan Ganti Rugi Lahan KA Bandara

KULONPROGO (KR) - Belum tuntasnya pembayaran ganti rugi lahan untuk pembangunan rel Kereta Api Bandara di wilayah Kapanewon Temon, Kabupaten Kulonprogo, mengundang keprihatinan Bupati Kulonprogo Drs H Sutedjo.

Karena itu pihaknya akan mengirim surat permohonan kepada Kementerian Perhubungan (Kemhub), agar pembebasan lahan tersebut berjalan sesuai proses dan mekanisme yang benar.

"Semula kami berencana hanya ingin mengirim surat permohonan ke Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) di Semarang, tapi atas saran Pak Sekda (RM Astungkoro) permohonan tersebut kita kirim sampai ke Kementerian Perhubungan dan kementerian terkait. Harapannya tentu saja proses pembayaran ganti rugi lahan segera dituntaskan," tegas Sutedjo di Gedung Kaca Kompleks Pemkab Kulonprogo, Kamis (25/6).

Ternyata, ungkap Sutedjo, tidak hanya warga Kalurahan Kaligintung, Kapanewon Temon saja yang belum tuntas pembayaran ganti rugi lahannya, tapi

juga warga kalurahan lain di antaranya Kalurahan Kalidengen, Glagah dan lainnya juga belum tuntas pembayarannya. "Terus terang Pemkab tidak bisa mengambil keputusan karena otoritasnya bukan di tingkat kabupaten, sehingga kami mengajukan surat permohonan sekaligus mendorong Pemerintah Pusat untuk segera menyelesaikan permasalahan ini," katanya.

Pernyataan Bupati Kulonprogo dibenarkan Lurah Kalidengen Sunardi. Di wilayahnya dari sekitar 160 bidang tanah terdampak pembangunan rel KA Bandara, baru separohnya yang dibayarkan, sementara sisanya belum diketahui kapan akan dilunasi.

Diungkapkan, sesuai kesepakatan, nilai ganti rugi lahan dengan warga terdampak sudah berlangsung Oktober 2019 silam. Besaran ganti rugi lahan permeternya paling rendah Rp 1,1 juta untuk lahan persawahan dan peka-

rangan, sementara untuk lahan yang berlokasi di pinggir Jalan Nasional Yogya-Purworejo tertinggi berkisar Rp 5 juta permeter persegi.

Warga katanya sudah mengirimkan berkas persyaratan ganti rugi kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Wilayah DIY sebagai bagian dari Tim Pengadaan Lahan. Berkas tersebut diteruskan ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) untuk dilakukan pemeriksaan. Jika ada berkas yang belum lengkap, bakal dikembalikan untuk dilengkapi. "Sekarang kemungkinan masih di LMAN, kemarin beberapa kali ada berkas yang dikembalikan untuk dilengkapi, setelah lengkap baru bisa dibayarkan," ungkapnya.

Molarnya pembayaran ganti rugi lahan KA Bandara tersebut diakui memang menimbulkan gejolak di masyarakat. Bahkan 30 warga terdampak melayangkan surat keberatan atas dimulainya proyek pembangunan rel. Surat ditujukan kepada Tim Pengadaan Lahan termasuk Pemerintah Kalurahan Kalidengen. (Rul)-f

GANJAR: KADER JANGAN TERPROVOKASI

PDIP Juga Tidak Setuju Paham PKI

SEMARANG (KR) - Gubernur Jateng Ganjar Pranowo yang juga politisi PDIP, meminta kader PDIP agar tidak terprovokasi aksi pembakaran bendera PDI di depan gedung DPR RI di Jakarta. Ganjar menyatakan sangat menyesalkan kejadian tersebut. Ganjar Pranowo mengatakan hal ini kepada wartawan di Semarang, Kamis (25/6).

Kasus pembakaran bendera PDIP tersebut viral di media sosial. "Kader jangan sampai terpancing provokasi pembakaran bendera PDIP itu. Jaga diri baik-baik, selesaikan kasus ini kepada DPP karena DPP PDIP sudah menyiapkan untuk mengambil langkah hukum," tutur Ganjar.

Ganjar membantah tuduhan, PDIP ber-

paham Partai Komunis Indonesia (PKI). Dirinya menegaskan, PDIP juga tidak setuju dengan PKI. "Saya orang PDIP, sudah cukup lama dan saya bukan PKI. Kami PDI, kami juga tidak setuju dengan PKI. Itu *clear*. Semua paham yang dilarang, kami tidak ada di sana, karena kami berada pada barisan yang sesuai konstitusi dan dasar negara," tegasnya.

Ganjar mendukung DPP PDIP untuk mengambil jalur hukum dalam persoalan ini. Apalagi PDIP sudah sangat terbiasa bergerak secara konstitusional.

Ganjar mengingatkan pada peristiwa 1996 saat PDIP diinjak-injak tidak karuan, dan mereka berjuang dengan cukup panjang. (Bdi)-f

BNN
KABUPATEN SLEMAN

STOP NARKOBA

#HIDUPI100% 2020
HANI
HARI ANTI NARKOTIKA INTERNASIONAL
SADAR, SEHAT, PRODUKTIF & BAHAGIA

AKBP Siti Alfiah, S.Psi., S.H., M.H.
Kepala BNN Kabupaten Sleman

0274-868 480 08 22222 16 480 slemankab.bnn.go.id @infobnn_kab_sleman